



{1.200 Mobil dari India Sudah Tiba}

Agrinas siap bertanggung jawab atas konsekuensi impor mobil dari India, termasuk 1.200 mobil yang sudah tiba di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan siap mematuhi apa pun keputusan pemerintah dan DPR terkait polemik impor mobil dari India untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Merah Putih, termasuk mengenai 1.200 pikap yang telah tiba di Indonesia.

"Apa pun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat. Saya sebagai Direktur BUMN akan taat, loyal, dan manut. Kalau memang diputuskan tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai," ujar Joao di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Ia mengatakan, seluruh konsekuensi atas keputusan impor mobil dari India, termasuk potensi gugatan ataupun denda dari pihak pema-

>> BACA JUGA:

Impor 105.000 Pikap Ancam Industri Otomotif

Impor mobil dalam bentuk utuh (*completely built up/CBU*) bisa mematikan industri otomotif dalam negeri dan tak menggerakkan ekonomi. KOMPAS.ID

komp.as/ancamindustri

sok (*supplier*), menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan.

"Kalau nanti digugat atau dipermasalahkan oleh *supplier*, itu tanggung jawab saya. Segala konsekuensinya akan saya tanggung," kata Joao.

Apabila muncul kewajiban denda atau penalti kontrak-

tual, Agrinas akan duduk bersama mitra pemasok untuk mencari solusi bisnis terbaik. "Bagaimana caranya nanti kita bisa mengolah itu atau mengembalikan kerugian yang mereka harus tanggung akibat daripada penolakan dari negara ini, (soal) itu saya akan bertanggung jawab," ucap Joao.

Kabar rencana impor mobil niaga dari India untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Merah Putih mulai terkuak pekan lalu. Mobil niaga dari India yang akan diimpor pemerintah melalui Agrinas berjumlah 105.000 unit.

Mobil yang akan diimpor dalam bentuk utuh (*completely built up/CBU*) itu terdiri atas 35.000 pikap (4x4) dan 35.000 truk roda enam dari

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

(Sambungan dari halaman 1)

Tata Motors. Sisanya berupa 35.000 pikap (4x4) produksi Mahindra & Mahindra Ltd. Belakangan, Joao mengakui, lebih dari 1.200 mobil impor itu sudah tiba di Indonesia.

Pertimbangan memilih impor mobil dari India, menurut Joao, adalah harganya lebih murah sekitar Rp 50 juta per unit. Pertimbangan lain terkait dengan spesifikasi kendaraan dan efisiensi anggaran pemerintah.

Rencana itu mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Indonesia Saleh Husin, Minggu (22/2), meminta pemerintah membatalkan rencana impor 105.000 mobil niaga dari India yang dia sebut bernilai Rp 24,66 triliun itu.

Alasannya, impor mobil dari India dalam jumlah besar tersebut akan mematikan industri otomotif nasional, tidak menggerakkan ekonomi, dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.

Sehari kemudian, Senin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta rencana impor itu ditunda. Ia mengaku sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar menunda impor tersebut. Terkait detail rencana impor mobil dari India, hal tersebut akan dibahas setelah Presiden kembali ke Indonesia dari lawatan ke Amerika Serikat.

Selain penolakan dari Kadin Indonesia, sejumlah ekonom dan serikat pekerja juga menyatakan menolak impor 105.000 pikap dari India dengan alasan senada.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Putu Juli Ardika menyatakan, industri otomotif nasional pada dasarnya siap memproduksi kendaraan niaga yang sesuai kebutuhan pasar, sepanjang terdapat permintaan yang konsisten dan dalam volume yang memadai.

Presiden Direktur PT Cahaya Sakti Motor sekaligus Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia Anton Kemal Tasli Kumonty mengatakan, industri pikap nasional telah berpengalaman lebih dari lima dekade dalam memproduksi dan memasok kendaraan untuk berbagai sektor, seperti logistik hingga pertambangan.

Terkait harga, Anton meminta hal tersebut dilihat secara komprehensif. "Apakah harga

di Indonesia kompetitif atau tidak, itu tergantung spesifikasi dan teknis yang diperlukan," ujarnya.

Proses terbuka

Dalam konferensi pers, Selasa, Joao menjelaskan, kebutuhan kendaraan dinilai mendesak seiring percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Hingga saat ini, 30.712 koperasi telah dibangun, dengan 1.357 bangunan sudah berdiri dan siap dioperasikan.

Kendaraan distribusi, lanjut Joao, dibutuhkan Koperasi Merah Putih untuk menghubungkan petani langsung dengan konsumen.

Ia mengatakan bahwa proses pengadaan mobil niaga untuk Koperasi Merah Putih dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur, mulai dari klarifikasi, kualifikasi, hingga negosiasi.

Menurut Joao, sejumlah produsen mobil niaga nasional sudah diundang, antara lain Astra, Krama Yudha, Mitsubishi, Hino, Suzuki Carry, dan Gran Max. Akan tetapi, sebagian besar produsen lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan volume ataupun harga yang diharapkan Agrinas.

"Semua produsen lokal kami undang. Tidak benar kalau kami tidak memberikan ruang. Masalah tidak terjadi kesepakatan, itu hal wajar dalam bisnis," kata Joao.

Ambisius

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) Riant Nugroho menjelaskan, kebijakan impor 105.000 mobil niaga merupakan kebijakan publik ambisius yang seharusnya bukan sekadar proyek pengadaan kendaraan. Kebijakan ini semestinya mendorong penguatan industri otomotif nasional, menciptakan efek ganda, dan menggerakkan ekonomi turunannya, seperti industri komponen, misalnya kaca, aki, ban, hingga sektor pendukung lain.

Untuk itu, pemerintah dan Agrinas semestinya sejak awal duduk bersama pelaku industri otomotif nasional untuk membagikan peran proyek secara terstruktur dan transparan.

Riant mengingatkan, apabila kebijakan ambisius tersebut tidak dijalankan sesuai dengan desain awal, misalnya tidak memberikan dampak pada penguatan industri dalam negeri, terdapat risiko penyimpangan dalam tata kelola ekonomi.

(GIO)